



LUTIM
JUARA



L A P O R A N K I N E R J A T R I W U L A N I V T A H U N 2 0 2 5

K E C A M A T A N
N U H A

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Triwulan IV Kecamatan Nuha ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kecamatan selama periode triwulan yang bersangkutan.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja, pelaksanaan program, serta kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung tercapainya visi serta misi pemerintah daerah. Selain itu, laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta merumuskan langkah-langkah perbaikan di masa mendatang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini, baik dari unsur pemerintah, lembaga masyarakat, maupun seluruh staf kecamatan Nuha yang telah bekerja dengan penuh dedikasi.

Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja aparatur kecamatan Nuha serta memperkuat sinergi dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sorowako, 10 Januari 2026

Camat Nuha,



ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom, M.Si.

Pangkat : Pembina

NIP. 19810204 200902 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1. LATAR BELAKANG | 1 |
| 2. PENJELASAN UMUM ORGANISASI | 1 |
| 2.1. KONDISI GEOGRAFIS | 1 |
| 2.2. STRUKTUR ORGANISASI | 2 |
| 2.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI | 3 |
| 2.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI | 6 |
| 2.4.2. Aspek Internal | 7 |
| 2.5. ISU STRATEGIS | 10 |
| 2.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN | 11 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 13 |
| 2.1. RENCANA STRATEGIS | 13 |
| 2.1.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH | 14 |
| 2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS | 16 |
| 2.1.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA | 17 |
| 2.2. PERJANJIAN KINERJA | 18 |
| 2.3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025 | 20 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 21 |
| 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | 21 |
| SASARAN PROGRAM | 47 |
| 3.2. REALISASI ANGGARAN | 80 |
| 3.3 REKOMENDASI | 83 |
| 3.4 TINDAK LANJUT | 83 |
| BAB IV PENUTUP | 85 |

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan *Good Governance* di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur. Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

2. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

2.1. KONDISI GEOGRAFIS

Kecamatan Nuha merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur dan dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270). Luas wilayah 859,71 Km² atau 12,74% Luasan tersebut membawa kecamatan Nuha sebagai kecamatan terluas kelima dari sebelas kecamatan yang ada di Luwu Timur. Di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Wasuponda dan sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kecamatan Towuti.. Kecamatan Nuha terdiri dari 4 (Empat) Desa dan 1 (satu) Kelurahan yaitu:

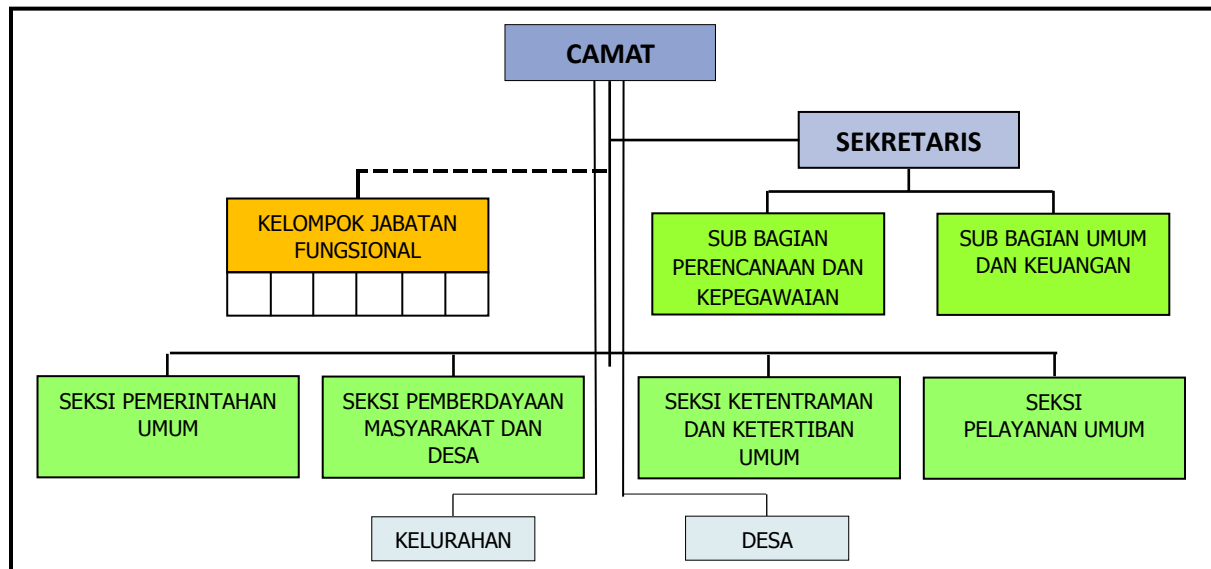
1. Desa Matano
2. Desa Sorowako
2. Desa Nuha
3. Desa Nikkel
4. Kelurahan Magani

2.2. STRUKTUR ORGANISASI

Pembentukan Organisasi Kecamatan Nuha ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kedudukan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan/ Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur. dapat dilihat pada gambar 1.1. sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Nuha



2.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentrman dan ketertiban umum; dan
- d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;

- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan Umum

Seksi Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan Umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentramandan ketertiban umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.4.ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

2.4.1. Aspek Eksternal

Aspek eksternal yang mendukung keberhasilan antara lain:

1. Dukungan pemerintah ditingkat lebih tinggi:
Pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat memiliki peran penting dalam menyediakan kebijakan, regulasi, serta alokasi sumber daya yang mendukung pemerintahan di tingkat kecamatan diantaranya kebijakan desentralisasi memberikan kewenangan lebih besar kepada kecamatan untuk mengelola urusan lokal.
2. Kondisi Sosial dan Budaya:
Penduduk Kecamatan Nuha terdiri dari berbagai suku dan agama. Dari kemajemukan tersebut menciptakan kondisi sosial dan budaya yang harmonis.
3. Stabilitas Keamanan:
Stabilitas keamanan memberikan iklim yang kondusif bagi pemerintah Kecamatan Nuha untuk bekerja tanpa gangguan konflik atau ketidakstabilan keamanan.
4. Partisipasi Masyarakat:
Keterlibatan aktif masyarakat dalam program-program pemerintahan, seperti musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), sangat berpengaruh. Partisipasi ini mencakup dukungan ide, tenaga, dan sumber daya masyarakat untuk program pemerintah.

2.4.2. Aspek Internal

Aspek internal yang mendukung terbagi atas 3 komponen yaitu:

1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam memberikan pelayanan publik, Kecamatan Nuha pada tahun 2024 didukung oleh 12 orang PNS yang terdiri dari:

- Eselon III/A sebanyak 1 orang
- Eselon III/B sebanyak 1 orang
- Eselon IV/A sebanyak 4 orang
- Eselon IV/B sebanyak 2 orang
- Pelaksana sebanyak 6 orang
- PPPK pelaksana sebanyak 4 orang

selain itu, untuk mengatasi kekurangan tenaga PNS, Kantor Kecamatan Nuha juga didukung oleh 2 orang tenaga upah jasa.

Berikut data PNS dan upah jasa pada Kantor Kecamatan Nuha tahun 2025:

A. Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

Tabel I.1.

Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Kantor Kecamatan Nuha Tahun 2025

| No | Golongan | S-3 / S-2 | | S-1 / D-4 | | D-1 / D-3 | | SLTA/ Sederajat | | SMP/ Sederajat | | SD/ Sederajat | | Total | |
|--------|--------------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|--------------------|----|-------------------|----|------------------|----|-------|----|
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Golongan IV | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2 | |
| 2 | Golongan III | | 2 | | 7 | | 2 | | | | | | | | 11 |
| 3 | Golongan II | | | | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | 2 |
| 4 | Golongan IX | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| 5 | Golongan X | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | 3 | 17 |

Sumber: Diolah dari Data Kepegawaian Kecamatan Nuha 2025

Tabel I.1. di atas, menunjukkan bahwa jumlah PNS pada Kecamatan Nuha sebanyak 16 orang, PPPK sebanyak 4 Orang yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Nuha sebagaimana digambarkan dalam grafik dibawah ini:

B. Jumlah pejabat Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin.

Komposisi pejabat struktural pada Kantor Kecamatan Nuha tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.2.

Jumlah Pejabat Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin Kecamatan Nuha Tahun 2025

| No | ESELON | S-3 / S-2 | | S-1 / D-4 | | D-1 / D-3 | | SLTA/ Sederajat | | SMP/ Sederajat | | SD/ Sederajat | | Total | |
|---------------|--------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|--------------------|------|-------------------|------|------------------|------|----------|----------|
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 1 | III/A | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 2 | III/B | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 3 | IV/A | | | | 6 | | | | | | | | | | 6 |
| 4 | IV/B | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | 6 | 2 |

Sumber: Diolah dari Data Kepegawaian Kecamatan Nuha 2025

Berdasarkan Tabel 1.2. di atas menunjukkan bahwa jumlah pejabat struktural sebanyak 8 (Delapan) orang yang didominasi oleh perempuan sebanyak 6 (orang) orang, dan laki-laki sebanyak 2 (dua) orang.

C. Jumlah Tenaga Upah Jasa dan Tenaga Sukarela Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin.

Jumlah Tenaga Upah Jasa pada Kantor Kecamatan Nuha tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.3.

Jumlah Tenaga Upah Jasa dan Sukarela berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Kecamatan Nuha Tahun 2025

| No | TENAGA UPAH JASA DAN SUKARELA | S-3 / S-2 | | S-1 / D-4 | | D-1 / D-3 | | SLTA/ Sederajat | | SMP/ Sederajat | | SD/ Sederajat | | Total | |
|---------------|-------------------------------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|--------------------|------|-------------------|------|------------------|------|-------|----------|
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 1 | Tenaga Upah Jasa | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | 3 |

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparaturnya Kantor Kecamatan Nuha meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin, serta jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Sumber: Diolah dari Data Kepegawaian Kecamatan Nuha 2025

Tabel I.4.

Sarana dan Prasarana Pendukung
Kecamatan Nuha Tahun 2025

| No | Uraian | Jumlah | Keterangan |
|----|----------------------|----------|------------|
| | Kecamatan : | | |
| 1. | Rujab | 1 Unit | Baik |
| 2. | Gedung Kantor | 1 Unit | Baik |
| 3. | Gedung Kantor | 1 Unit | Baik |
| 4. | Tanah Bangunan Rujab | 7,574 M2 | Baik |
| 5. | Tanah Bangunan E-KTP | 1,559M2 | Baik |
| 6 | Mobil | 1 unit | Baik |
| 7. | Sepeda motor | 2 unit | Baik |

Sumber: Sub Bagian Umum dan Keuangan

3. Sumber Daya Anggaran:

Sumber Daya Anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Kantor Kecamatan Nuha bersumber dari dana APBD Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

Tabel I.5.
Sumber Daya Anggaran

| KODE REK | URAIAN | JUMLAH |
|----------|-------------------------|-------------------|
| 5.1. | BELANJA OPERASI | Rp.3.932.951.208 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | Rp. 2.766.498.802 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | Rp.1.166.452.406 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | Rp.10.300.000 |

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Efisiensi Kecamatan Nuha T.A 2025

2.5. ISU STRATEGIS

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kecamatan Nuha dituntut lebih transparan, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Adapun isu-isu yang akan dihadapi Kecamatan Nuha tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Luwu Timur antara lain:

1. Tuntutan masyarakat dalam menerima pelayanan publik yang prima;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana yang tercantum didalam Renstra Kecamatan Nuha yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nuha sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan transparan.

2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Menetapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Memperhatikan isu-isu permasalahan diatas terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mampu menghadirkan dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya.

2.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKJ) Kecamatan Nuha tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menguraikan tentang ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan target dan realisasi tahun ini;
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar;

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran:

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja ditahun kedepannya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis pada laporan evaluasi kecamatan merupakan panduan utama dalam mengarahkan pembangunan wilayah secara terukur, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rencana ini mencakup penetapan visi, misi, serta tujuan jangka menengah dan jangka panjang yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, dan optimalisasi potensi lokal. Strategi yang disusun meliputi pengembangan infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan kolaborasi antarinstansi dan partisipasi warga. Setiap program dan kegiatan dirancang berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya, dengan indikator keberhasilan yang jelas untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan pencapaian target pembangunan kecamatan secara menyeluruh.

Dengan renstra memastikan bahwa sumberdaya dan dana wilayah diarahkan untuk menangani isu-isu strategis dan permasalahan prioritas, sekaligus menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai tujuan. Kecuali itu, melalui renstra, arah pembangunan Kecamatan Nuha bisa lebih dipahami masyarakat, sehingga melahirkan rasa ikut memiliki dan bertanggungjawab.

Penyusunan renstra Kecamatan Nuha mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029 dan dilaksanakan secara partisipatif antar instansi dan stakeholder terkait. Secara ringkas, renstra Kecamatan Nuha dapat di ilustrasikan sebagai berikut :

2.1.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

A. VISI

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, penyusunan perencanaan pembangunan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan sistematis, terpadu, terarah dan sesuai dengan cita-cita yang ingin diwujudkan. Suatu hal yang mendasar dari setiap perencanaan adalah perumusan visi dan misi, yang merupakan suatu nilai yang ingin dicapai dalam periode tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan kondisi umum masyarakat Kabupaten Luwu Timur saat ini, permasalahan yang dihadapi, tantangan yang dihadapi dalam lima tahun mendatang dan sesuai dengan cita-cita pemerintah Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029 maka visi Kabupaten Luwu Timur yang ingin diwujudkan adalah :

“ Luwu Timur Maju dan Sejahtera”

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut :

- **“Sejahtera”** mengandung makna meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan, peningkatan kegembiraan membaca dan literasi, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kompetensi dan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan serta tenaga kesehatan, mendukung pengembangan rumah sakit dan layanan kesehatan, mengutamakan perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat dan kualitas keluarga, perlindungan perempuan dan anak, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana ibadah, memelihara kerukunan umat beragama, dan memelihara situasi kondusif bagi pengamalan nilai dan norma agama dan melestarikan budaya daerah.
- **“maju”** Mengandung makna upaya meningkatkan pemanfaatan sumberdaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, stabilitas ekonomi, serta memastikan distribusi pertumbuhan yang sejalan antar sektor guna menghindari ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu, pemanfaatan koordinasi dan keharmonisan kerja antar stakeholder pembangunan ekonomi

daerah dan optimalisasi tugas dan fungsi pengendalian dan pemaantauan inflasi daerah; selain itu misi juga mencakup peningkatan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan serta memperkuat koperasi dan UMKN, peningkatan daya saing pariwisata, penguatan sistem penyuluhan, pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kedaulatan pangan promosi peluang investasi pada berbagai sektor usaha potensial di daerah untuk membuka kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih luas, mengembangkan iklim dan sarana/prasarana pendukung investasi daerah, mendorong transparansi dan mempermudah perizinan serta membuka peluang investasi .

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Luwu Timur, maka diupayakan melalui 5 (Lima) Misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya yang berkualitas berbudaya dan berdaya saing;
2. Meningkatkan daya saing ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas;
3. Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan;
4. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup yang terintegrasi;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui Transformasi Digital.

Misi RPJMD yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Nuha Kab. Luwu Timur adalah Misi Ke-5 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital”, Misi ini mencakup upaya penguatan kelembagaan dan tata-laksana pemerintahan daerah melalui transformasi reformasi birokrasi, penguatan sistem pemerintahan berbasis digital, meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur, mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi, menertibkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan memperbaiki

administrasi pemerintahan umum serta mengembangkan kerjasama, multipihak dalam mendorong inovasi dan akselerasi pembangunan daerah.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan sasaran strategis kecamatan disusun sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat di tingkat wilayah. Tujuan strategis berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan potensi lokal untuk mendukung kesejahteraan warga. Sementara itu, sasaran strategis diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, peningkatan partisipasi warga dalam pembangunan, serta terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan berdaya saing. Melalui tujuan dan sasaran ini, kecamatan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di wilayahnya.

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah dapat diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan tersebut diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama 5 tahun:

Tujuan dan sasaran Kecamatan Nuha 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Strategis

| VISI RPJMD: LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA | | |
|--|---|--|
| MISI 5: | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital | |
| NO | TUJUAN | SASARAN |
| 1 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yang berkualitas | 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah |
| | | 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat |

2.1.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat kecamatan merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan program kerja pemerintahan di wilayah tersebut. IKU berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan selaras dengan tujuan pembangunan daerah serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui pengukuran yang terarah dan terukur, kecamatan dapat mengevaluasi efektivitas pelayanan publik, efisiensi penggunaan sumber daya, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur. Dengan demikian, IKU menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama. Dimana tujuan dan sasaran memiliki indikator sebagai alat ukur terhadap capaian kinerja yang dilakukan.

Tabel 2.2.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA |
|----|--|--|----------------------------------|
| 1 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yang berkualitas | 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP |
| | | 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada pemerintah kecamatan merupakan dokumen formal yang berisi komitmen antara camat sebagai pimpinan unit kerja dengan pihak yang lebih tinggi, seperti bupati atau wali kota, dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen ini menjadi dasar akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Melalui perjanjian kinerja, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Selain itu, perjanjian ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja, sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik kepada mas

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Nuha Tahun 2025:

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET TAHUN 2025 |
|----|--|--|-------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | 66 |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 81,50 |
| | SASARAN PROGRAM | | |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi | Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar | 100% |
| 4 | Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik | Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 100% |
| 5 | Meningkatnya pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan | 100% |
| 6 | Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan | 100% |
| 7 | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan | 100% |
| 8 | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan | 100% |

| | | | |
|--|--|------------------------------------|--|
| | | ketentuan perundangan yang berlaku | |
|--|--|------------------------------------|--|

2.3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025 yang terdiri dari 6 (enam) Program dengan anggaran sebesar **Rp.3.976.522.458,-** dengan gambaran sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Program pada RKA Perubahan Tahun 2025.

| No | PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) |
|-----|--|---------------|
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 3.584.477.458 |
| II | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 7.434.850 |
| III | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 321.644.950 |
| IV | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 20.050.850 |
| V | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 32.623.000 |
| VI | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 10.291.350 |

Sumber: RKAP Kecamatan Nuha Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu **pertama**, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan, **kedua**, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya, **ketiga**, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Nuha pada periode ini, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1

Pengukuran Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
Kecamatan Nuha Triwulan IV Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | 2025 | | |
|----|---|--|--------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (realisasi berdasarkan LHE Lkj Tw III 2025) | Nilai AKIP | 66 | 63,54 | 96,27 |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 81,50 | 82,23 | 100,89% |
| | SASARAN PROGRAM | | | | |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi | Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar | 100% | 99,40% | 99,40% |
| 4 | Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik | Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | |
|---|--|--|------|------|------|
| | | pemerintahan dan pelayanan publik | | | |
| 5 | Meningkatnya pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku | 100% | 100% | 100% |

➤ **SASARAN STRATEGIS**

Berikut akan dijabarkan secara rinci hasil pengukuran kinerja setiap sasaran strategis :

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Defenisi operasional dari sasaran ini adalah kondisi di mana organisasi atau instansi publik menunjukkan peningkatan dalam tanggung jawab, transparansi, dan kejelasan

dalam pengelolaan sumber daya serta pencapaian hasil kerja. meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan tercermin dari perbaikan sistem pelaporan, peningkatan transparansi, serta konsistensi dalam pencapaian hasil dan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab.

| Nama Indikator | Nilai AKIP |
|---------------------|---|
| Interpretasi | sistem yang digunakan pemerintah (pusat dan daerah) untuk memastikan bahwa setiap program/kegiatan yang dilaksanakan berorientasi pada hasil (outcome) dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. |
| Rumus Perhitungan | <p> $\text{Nilai AKIP} = (0,10 \times \text{nilai perencanaan Kinerja}) + (0,15 \times \text{Nilai Pengukuran Kinerja}) + (0,10 \times \text{Nilai Pelaporan Kinerja}) + (0,10 \times \text{nilai Evaluasi Kinerja}) + (0,55 \times \text{Nilai capaian Kinerja})$ </p> <p>-</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sangat Memuaskan (AA) (90-100) : Kinerja sangat akuntabel, penggunaan anggaran sangat efisien dan efektif, fokus pada hasil. - Memuaskan (A) (80-<90) : Akuntabilitas tinggi, program berjalan efektif dan efisien - Baik (BB) (70-<80) : Sudah menunjukkan efisiensi dan efektivitas, namun masih ada ruang perbaikan. - Cukup Baik (B) (60-<70) : Akuntabilitas dasar telah ada, tetapi belum sepenuhnya fokus pada hasil - Kurang Baik (CC) (50-<60) : Masih fokus pada input dan output, belum efektif dalam pencapaian hasil - Buruk (D) (<50) : Rendahnya akuntabilitas, penggunaan anggaran tidak berorientasi hasil |
| Sumber Data | Inspektorat Kab. Luwu Timur |
| OPD Penanggungjawab | Kecamatan Nuha |

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat

Definisi operasional dari sasaran ini mengacu pada peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, yang diukur melalui **survey Kepuasan Masyarakat**. Meningkatnya kemampuan pelayanan publik berarti adanya perbaikan dalam aspek kompetensi aparatur, efektivitas proses pelayanan, serta kualitas hasil pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Peningkatan ini tercermin dari naiknya nilai IKM yang menunjukkan persepsi positif masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan.

Indikator Pengukuran (berdasarkan IKM):

1. Kualitas Pelayanan: Ketepatan, kejelasan, dan kemudahan prosedur pelayanan publik.
2. Kecepatan dan Ketepatan Waktu: Waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Kompetensi dan Sikap Petugas: Kemampuan, keramahan, dan tanggung jawab aparatur dalam melayani masyarakat.
4. Keadilan dan Kepastian Layanan: Kesetaraan dalam pemberian layanan tanpa diskriminasi.
5. Sarana dan Prasarana: Ketersediaan fasilitas pendukung pelayanan yang memadai dan nyaman.

Cara Pengukuran:

Peningkatan kemampuan pelayanan publik diukur melalui perbandingan nilai IKM dari periode sebelumnya dengan periode berjalan. Kenaikan nilai IKM menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan.

| | |
|---------------------|---|
| Nama Indikator | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| Interpretasi | Indeks Kepuasan Masyarakat memberikan gambaran objektif mengenai persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik. Nilai IKM yang tinggi mencerminkan keberhasilan instansi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, sedangkan nilai rendah menjadi sinyal perlunya peningkatan kinerja dan perbaikan sistem pelayanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. |
| Rumus Perhitungan | $X = \frac{Y}{\text{Nilai Dasar}}$ dimana X = nilai indeks Y = nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) setelah dikonversi Nilai Dasar = 25 Predikat/kategori capaian IKM yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Nilai Interval 88,31-100 Kategori A Predikat Sangat Baik - Nilai Interval 76,61-88,30 Kategori B Predikat Baik - Nilai Interval 65-76,60 kategori C Predikat Kurang Baik - Nilai interval 25-64,99 kategori D Predikat Tidak Baik |
| Sumber Data | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Nuha |
| OPD Penanggungjawab | Kecamatan Nuha |

Dengan demikian, peningkatan kemampuan pelayanan publik dapat dinyatakan terjadi apabila nilai IKM mengalami kenaikan dan berada pada kategori yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

➤ SASARAN PROGRAM

Sasaran 3

Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi

Sasaran ini dipilih untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penunjang urusan perangkat daerah di Kecamatan Nuha dilaksanakan secara tertib, terencana, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kegiatan penunjang memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, khususnya dalam aspek perencanaan, penganggaran, administrasi, kepegawaian, dan pelaporan. Dengan optimalnya pelaksanaan kegiatan penunjang, diharapkan seluruh program dan kegiatan utama kecamatan dapat berjalan efektif dan memberikan dukungan nyata terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Indikator Kinerja

- Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar

| Nama Indikator | Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar |
|-------------------|--|
| Interpretasi | Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar menggambarkan tingkat keterlaksanaan seluruh kegiatan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan oleh kecamatan sesuai dengan standar operasional prosedur, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dokumen perencanaan dan penganggaran yang berlaku, sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan. |
| Rumus Perhitungan | $(\text{Realisasi} \div \text{target}) \times 100 \%$ |

| | |
|------------------------|------------------------------|
| | |
| Sumber Data | Bagian Sekretariat Kec. Nuha |
| OPD Penanggungjawab | Kecamatan Nuha |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PENJELASAN |
|----|--|--------|--|
| 1. | Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar | 100% | Target 100% pada indikator Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa seluruh kegiatan penunjang merupakan fungsi wajib kecamatan yang harus dilaksanakan secara menyeluruh sesuai standar operasional prosedur, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dokumen perencanaan yang berlaku. Penetapan target ini juga diselaraskan dengan Renstra Kecamatan dan kebutuhan untuk memastikan dukungan administrasi, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian berjalan optimal dalam mendukung pencapaian kinerja utama kecamatan, sehingga target tersebut dinilai realistis dan dapat dicapai.. |

Sasaran 4

Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik

Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif, efisien, akuntabel, serta berorientasi pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kecamatan Nuha berupaya memastikan seluruh fungsi pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pencapaian sasaran ini difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur, peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, serta optimalisasi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Nuha. Dengan demikian, diharapkan terwujud pelayanan publik yang cepat, tepat, dan mudah diakses, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan dasar di tingkat Kecamatan

Indikator Kinerja :

“Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik”

| Nama Indikator | Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik |
|----------------|---|
| Interpretasi | Indikator Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menunjukkan tingkat keberhasilan Kecamatan Nuha dalam melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator ini menggambarkan sejauh mana pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik telah berjalan efektif, efisien, dan sesuai standar pelayanan, ditinjau dari kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kinerja, sehingga mencerminkan |

| | |
|---------------------|--|
| | kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan serta kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.. |
| Rumus Perhitungan | (Realisasi dibagi target) X 100 % |
| Sumber Data | Seksi Pelayanan Umum Kec. Nuha |
| OPD Penanggungjawab | Kecamatan Nuha |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PENJELASAN |
|----|--|--------|---|
| 1. | Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 100% | Target indikator Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ditetapkan sebesar 100% karena seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan kewajiban pemerintahan yang harus dilaksanakan secara penuh oleh Kecamatan Nuha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan yang berlaku. Penetapan target ini mencerminkan komitmen kecamatan untuk melaksanakan seluruh fungsi |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal, tanpa mengurangi kualitas maupun cakupan layanan kepada masyarakat. |
|--|--|--|---|

Sasaran 5

Meningkatnya pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Sasaran Meningkatkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ditetapkan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, partisipatif, dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan di wilayah Kecamatan Nuha. Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, kecamatan berperan dalam memfasilitasi, mengoordinasikan, dan membina pemerintah desa dan kelurahan serta masyarakat agar mampu mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan memperkuat peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.

Pencapaian sasaran ini diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan partisipatif, penguatan kelembagaan kemasyarakatan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa dan kelurahan. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif di Kecamatan Nuha.

Indikator Kinerja :

“Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan”

| | |
|---------------------|--|
| Nama Indikator | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan |
| Interpretasi | <p>Indikator Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan menggambarkan tingkat keberhasilan Kecamatan Nuha dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana upaya fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan kepada pemerintah desa dan kelurahan serta masyarakat telah berjalan efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat kelembagaan kemasyarakatan, dan mengembangkan potensi lokal.</p> <p>Semakin tinggi persentase capaian indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Nuha telah terlaksana secara optimal, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Sebaliknya, capaian yang belum optimal menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program agar pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat...</p> |
| Rumus Perhitungan | (Realisasi dibagi target) X 100 % |
| Sumber Data | Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kec. Nuha |
| OPD Penanggungjawab | Kecamatan Nuha |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PENJELASAN |
|----|---|--------|---|
| 1. | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan | 100% | Target indikator Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ditetapkan sebesar 100% karena seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan fungsi fasilitasi dan pembinaan yang wajib dilaksanakan oleh Kecamatan Nuha sesuai dengan kewenangannya. Penetapan target ini mencerminkan komitmen kecamatan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan pemberdayaan secara menyeluruh, terencana, dan berkesinambungan dalam satu periode perencanaan. Selain itu, target 100% menunjukkan bahwa seluruh rencana kerja yang telah disusun diharapkan dapat direalisasikan sepenuhnya, baik dalam aspek pembinaan kelembagaan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat, maupun penguatan kapasitas desa dan kelurahan. Dengan tercapainya target ini, diharapkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Nuha.. |
|--|--|--|--|

Sasaran 6

Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Sasaran Meningkatkan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan ditetapkan untuk mewujudkan kondisi wilayah Kecamatan Nuha yang aman, tertib, dan kondusif sebagai prasyarat utama bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan bermasyarakat. Melalui Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kecamatan Nuha berperan dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mendukung pelaksanaan upaya penegakan ketenteraman dan ketertiban umum bersama unsur terkait di tingkat kecamatan.

Pencapaian sasaran ini diarahkan pada peningkatan efektivitas koordinasi lintas sektor, penguatan peran aparat dan kelembagaan kewilayahan, serta peningkatan responsivitas terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan demikian, diharapkan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dapat dilaksanakan secara terpadu, preventif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta mendukung stabilitas sosial di wilayah Kecamatan Nuha

Indikator Kinerja :

“Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum”

| | |
|---------------------|---|
| Nama Indikator | Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum |
| Interpretasi | Indikator Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum menggambarkan tingkat keberhasilan Kecamatan Nuha dalam melaksanakan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan efektivitas koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan yang dilakukan kecamatan bersama unsur terkait dalam menjaga kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif, yang diukur melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja dari seluruh kegiatan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum. Semakin tinggi persentase capaian indikator ini menunjukkan bahwa pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Nuha telah berjalan secara optimal, responsif, dan berkelanjutan dalam mendukung rasa aman serta kenyamanan masyarakat. |
| Rumus Perhitungan | $(\text{Realisasi dibagi target}) \times 100 \%$ |
| Sumber Data | Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Nuha |
| OPD Penanggungjawab | Kecamatan Nuha |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PENJELASAN |
|----|---|--------|--|
| 1. | Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum | 100% | Target indikator Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum ditetapkan sebesar 100% karena pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan fungsi dasar pemerintahan yang wajib dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan oleh Kecamatan Nuha sesuai dengan kewenangannya. Seluruh kegiatan dalam Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah direncanakan untuk menjamin terciptanya kondisi wilayah yang aman dan tertib, sehingga dituntut untuk dapat direalisasikan secara penuh dalam satu periode perencanaan. Penetapan target 100% juga mencerminkan komitmen kecamatan untuk melaksanakan seluruh rencana koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum tanpa pengurangan cakupan maupun kualitas pelayanan. Dengan tercapainya target ini, diharapkan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Nuha dapat berjalan secara efektif, responsif, dan terkoordinasi, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta mendukung stabilitas sosial di wilayah kecamatan. |

Sasaran 7

Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ditetapkan untuk memastikan terselenggaranya urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan Nuha secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, kecamatan berperan dalam melaksanakan fungsi pembinaan wawasan kebangsaan, koordinasi antar unsur pemerintahan, pemeliharaan persatuan dan kesatuan, serta fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum di tingkat kecamatan.

Pencapaian sasaran ini diarahkan pada peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi antar instansi vertikal, perangkat daerah, serta unsur masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Nuha diharapkan dapat berjalan secara tertib, kondusif, dan berkelanjutan, serta mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

Indikator Kinerja :

“Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan”

| Nama Indikator | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan |
|-------------------|--|
| Interpretasi | Indikator Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan menggambarkan tingkat keberhasilan Kecamatan Nuha dalam melaksanakan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana pelaksanaan fungsi pemerintahan umum—meliputi koordinasi antar unsur pemerintahan, pembinaan wawasan kebangsaan, pemeliharaan persatuan dan kesatuan, serta fasilitasi tugas-tugas pemerintahan umum—telah dilaksanakan secara efektif dan terkoordinasi. Semakin tinggi persentase capaian indikator ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Nuha berjalan optimal, tertib, dan kondusif dalam mendukung stabilitas pemerintahan, ketenteraman sosial, serta kelancaran pembangunan di wilayah kecamatan |
| Rumus Perhitungan | (Realisasi dibagi target) X 100 % |
| Sumber Data | Seksi Pemerintahan Umum Kec. Nuha |

| | |
|------------------------|----------------|
| OPD Penanggungjawab | Kecamatan Nuha |
|------------------------|----------------|

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PENJELASAN |
|----|---|--------|--|
| 1. | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan | 100% | Target indikator Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan ditetapkan sebesar 100% karena penyelenggaraan urusan pemerintahan umum merupakan tugas dan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Nuha secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh kegiatan yang direncanakan dalam Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum disusun untuk mendukung terciptanya stabilitas pemerintahan, ketenteraman sosial, serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah kecamatan, sehingga diharapkan dapat direalisasikan sepenuhnya dalam satu periode perencanaan. Penetapan target 100% juga mencerminkan komitmen Kecamatan Nuha untuk melaksanakan seluruh fungsi pemerintahan umum—meliputi koordinasi antar unsur |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>pemerintahan, pembinaan wawasan kebangsaan, serta pemeliharaan persatuan dan kesatuan—secara optimal tanpa pengurangan kualitas maupun cakupan kegiatan. Dengan tercapainya target tersebut, diharapkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat berjalan secara efektif, tertib, dan kondusif, serta memberikan dukungan yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Nuha.</p> |
|--|--|--|---|

Sasaran 8

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Sasaran Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Kecamatan Nuha berperan dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan desa berjalan secara efektif dan bertanggung jawab.

Pencapaian sasaran ini diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur desa, tertib administrasi pemerintahan desa, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan desa. Dengan demikian, diharapkan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Nuha mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, profesional, dan berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya pembangunan desa yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja :

“Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku”

| Nama Indikator | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku |
|----------------|--|
| Interpretasi | Indikator Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menggambarkan tingkat kepatuhan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Nuha terhadap regulasi, pedoman teknis, serta standar administrasi pemerintahan desa. Indikator ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa melalui pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan yang dilakukan kecamatan terhadap pemerintah desa, khususnya dalam aspek tata kelola pemerintahan, administrasi desa, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan pembangunan desa. Semakin tinggi persentase capaian indikator ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa telah |

| | |
|---------------------|--|
| | berjalan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa yang berkelanjutan di Kecamatan Nuha. |
| Rumus Perhitungan | (Realisasi dibagi target) X 100 % |
| Sumber Data | Seksi Pemerintahan Umum Kec. Nuha |
| OPD Penanggungjawab | Kecamatan Nuha |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PENJELASAN |
|----|--|--------|---|
| 1. | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku | 100% | Target indikator Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebesar 100% karena seluruh desa di wilayah Kecamatan Nuha wajib menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan regulasi dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang tertib, akuntabel, dan transparan, sehingga dituntut untuk dapat dipenuhi secara menyeluruh tanpa pengecualian. Penetapan target 100% juga mencerminkan komitmen Kecamatan Nuha dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal terhadap seluruh pemerintah desa. Dengan tercapainya target ini, diharapkan seluruh desa mampu menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai standar, meminimalkan potensi penyimpangan administrasi maupun keuangan, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian pembangunan desa yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah</p> |
|--|--|--|---|

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja Utama dapat) dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN PREDIKAT | |
|---|--|--------|-----------|------------------|------|
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah(berdasarkan LHE Tw III) | Nilai AKIP | 66 | 63,54 | 96,27 | B |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 81,50 | 82,23 | 100,89% | Baik |
| SASARAN PROGRAM | | | | | |
| Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi | Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar | 100% | 99,40% | 99,40% | |
| Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik | Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan | 100% | 100% | 100% | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PREDIKAT |
|--|--|--------|-----------|---------|----------|
| | dan pelayanan publik | | | | |
| Meningkatnya pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan | 100% | 100% | 100% | |
| Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Persentase Capaian Kinerja Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | 100% | 100% | 100% | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan | 100% | 100% | 100% | |
| Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku | 100% | 100% | 100% | |

Sumber: Kecamatan Nuha Tahun 2025

1. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Berdasarkan Tabel 3.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025, diketahui bahwa sasaran strategis “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” diukur melalui indikator Nilai AKIP dengan target sebesar 66. Berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Triwulan III, realisasi Nilai AKIP Kecamatan Nuha mencapai 63,54.

Capaian kinerja yang diperoleh sebesar 96,27%, yang menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan Nuha berada pada kategori tinggi dan mendekati target yang ditetapkan. Meskipun target belum sepenuhnya tercapai, predikat kinerja yang diperoleh tetap berada pada kategori “B”, yang mencerminkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik dan sebagian besar komponen AKIP telah terpenuhi.

Selisih antara target dan realisasi disebabkan oleh masih adanya beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, antara lain penguatan keterkaitan antara perencanaan, pengukuran kinerja, dan pelaporan, serta peningkatan kualitas tindak lanjut atas hasil evaluasi. Namun demikian, capaian ini menunjukkan adanya tren perbaikan dan komitmen Kecamatan Nuha dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan antara target dan realisasi Nilai AKIP Tahun 2025 menggambarkan bahwa Kecamatan Nuha telah berada pada jalur yang tepat dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, dan dengan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi secara konsisten, target yang ditetapkan berpotensi dapat dicapai pada periode evaluasi berikutnya

2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Indikator kinerja sasaran ini adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** dengan target sebesar **81,50**. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi IKM Triwulan IV Tahun 2025 mencapai **82,23**, sehingga capaian kinerja sebesar **100,89%**, atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Nuha berada pada kategori sangat baik dan telah melampaui target kinerja. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, sebagai hasil dari perbaikan prosedur pelayanan, peningkatan kedisiplinan aparatur, serta optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan publik.

SASARAN PROGRAM

3. Sasaran Program 1

Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi

Target indikator persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ditetapkan sebesar **100%**, dengan realisasi sebesar **99,40%**, sehingga capaian kinerja mencapai **99,40%**.

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan penunjang telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selisih capaian yang relatif kecil disebabkan oleh adanya beberapa aspek administrasi yang masih perlu penyempurnaan, namun tidak berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nuha.

4. Sasaran Program 2

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Indikator kinerja pada sasaran ini ditargetkan sebesar **100%** dan terealisasi **100%**, sehingga capaian kinerja mencapai **100%**.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Nuha telah dilaksanakan sesuai rencana kerja, kewenangan yang dilimpahkan, serta standar pelayanan yang ditetapkan, sehingga sasaran program dapat dicapai secara optimal.

5. Sasaran Program 3

Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Target kinerja sebesar **100%** dan realisasi capaian juga sebesar **100%**, sehingga capaian kinerja tercapai sepenuhnya.

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Nuha telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan mampu mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

6. Sasaran Program 4

Meningkatnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan

Indikator kinerja sasaran ini ditargetkan sebesar **100%** dan terealisasi **100%**, sehingga capaian kinerja mencapai **100%**.

Capaian tersebut mencerminkan terlaksananya pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum secara optimal melalui koordinasi lintas sektor, pembinaan masyarakat, serta upaya pencegahan gangguan ketertiban di wilayah Kecamatan Nuha.

7. Sasaran Program 5

Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Target kinerja sebesar **100%** dan realisasi capaian juga sebesar **100%**, sehingga sasaran program ini tercapai sepenuhnya.

Capaian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Nuha telah melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang diberikan, serta mendukung terciptanya stabilitas dan ketenteraman wilayah.

8. Sasaran Program 6

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Indikator kinerja pada sasaran ini ditargetkan sebesar **100%** dan terealisasi **100%**, sehingga capaian kinerja mencapai **100%**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Nuha telah dilaksanakan secara optimal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil perbandingan antara target dan realisasi kinerja Triwulan IV Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Kecamatan Nuha berada pada kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian besar indikator kinerja sasaran strategis dan sasaran program yang telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pada tingkat sasaran strategis, indikator kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan capaian 100,89%, yang berarti melampaui target kinerja. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Nuha serta keberhasilan upaya perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. Sementara itu, indikator Nilai AKIP belum dapat dievaluasi karena hasil penilaian belum dirilis oleh instansi yang berwenang. Meskipun demikian, seluruh tahapan manajemen kinerja tetap dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Pada tingkat sasaran program, hampir seluruh indikator kinerja menunjukkan capaian 100%, yang menandakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Capaian sedikit di bawah target hanya terjadi pada sasaran kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat daerah dengan capaian 99,40%, namun selisih tersebut relatif kecil dan tidak berdampak signifikan terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan target dan realisasi kinerja Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan di Kecamatan Nuha telah berjalan efektif dan akuntabel, serta selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 dan Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2025–2029. Capaian kinerja ini menjadi dasar yang kuat untuk

mempertahankan kinerja yang telah baik sekaligus mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tahun berikutnya..

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun lalu Dan Beberapa Tahun terakhir

Tabel 3.3

Perbandingan realisasi kinerja Tahun Ini dengan beberapa tahun terakhir

| No | Indikator Kinerja | Tahun | Realisasi | Predikat |
|----|---------------------------------------|---------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 2021 (TW IV) | 80,03 | BAIK |
| | | 2022 (TW IV) | 80,05 | BAIK |
| | | 2023 (TW IV) | 80,62 | BAIK |
| | | 2024 (TW IV) | 81,02 | BAIK |
| | | 2025 (TW IV) | 81,95 | BAIK |
| 2 | Nilai Akip | 2021 (TW IV) | 64,54 | B |
| | | 2022 (TW IV) | 58,40 | CC |
| | | 2023 (TW IV) | 62,50 | B |
| | | 2024 (TW IV) | 64,70 | B |
| | | 2025 (TW III) | 63,74 | B |
| 3 | Persentase Penunjang Urusan Perangkat | 2022 (TW IV) | 100% | |

| No | Indikator Kinerja | Tahun | Realisasi | Predikat |
|----|--|--------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| | Daerah Berjalan Sesuai Standar | | | |
| | | 2023 (TW IV) | 100% | |
| | | 2024 (TW IV) | 98,71 | |
| | | 2025 (TW IV) | 99,40 | |
| 4 | Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 2022 (TW IV) | 100% | |
| | | 2023 (TW IV) | 100% | |
| | | 2024 (TW IV) | 100% | |
| | | 2025 (TW IV) | 100% | |
| 5 | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan | 2022 (TW IV) | 100% | |
| | | 2023 (TW IV) | 100% | |
| | | 2024 (TW IV) | 100% | |
| | | 2025 (TW IV) | 100% | |
| 6 | Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Ketenteraman | 2022 (TW IV) | 100% | |

| No | Indikator Kinerja | Tahun | Realisasi | Predikat |
|----|--|--------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| | dan Ketertiban Umum di Kecamatan | | | |
| | | 2023 (TW IV) | 100% | |
| | | 2024 (TW IV) | 100% | |
| | | 2025 (TW IV) | 100% | |
| 7 | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan | 2022 (TW IV) | 100% | |
| | | 2023 (TW IV) | 100% | |
| | | 2024 (TW IV) | 100% | |
| | | 2025 (TW IV) | 100% | |
| 8 | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku | 2022 (TW IV) | 100% | |
| | | 2023 (TW IV) | 100% | |
| | | 2024 (TW IV) | 100% | |
| | | 2025 (TW IV) | 100% | |

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan data Tahun 2021–2025 (TW IV), **Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan tren peningkatan yang konsisten** dari tahun ke tahun. Nilai IKM meningkat dari **80,03 pada Tahun 2021** menjadi **81,95 pada Tahun 2025**, dengan predikat **“Baik”** pada seluruh periode pengukuran.

Kenaikan nilai IKM ini mengindikasikan adanya **perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pelayanan publik**, baik dari aspek prosedur pelayanan, sikap dan kompetensi aparatur, maupun sarana dan prasarana pelayanan. Meskipun peningkatannya relatif bertahap, tren positif ini mencerminkan **komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kepuasan masyarakat secara berkesinambungan**.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Nilai AKIP pada periode yang sama menunjukkan **fluktuasi kinerja**, namun cenderung mengalami **perbaikan dalam beberapa tahun terakhir**. Pada Tahun 2021, nilai AKIP sebesar **64,54 (predikat B)**, kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2022 menjadi **58,40 (predikat CC)**. Selanjutnya, pada Tahun 2023 dan 2024, nilai AKIP kembali meningkat masing-masing menjadi **62,50** dan **64,70**, dengan predikat **B**.

Untuk Tahun 2025, nilai AKIP TW III 63,54, namun predikat sementara masih berada pada kategori **B**. Tren ini menunjukkan bahwa setelah penurunan di Tahun 2022, telah dilakukan berbagai upaya perbaikan dalam **perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja**, sehingga mampu mengembalikan nilai AKIP ke kategori yang lebih baik.

3. Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar

Indikator **Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar** menunjukkan kinerja yang **sangat baik**. Pada Tahun 2022 dan 2023, capaian mencapai **100%**, kemudian sedikit menurun pada Tahun 2024 menjadi **98,71%**, dan kembali meningkat pada Tahun 2025 menjadi **99,40%**.

Penurunan kecil pada Tahun 2024 tidak berdampak signifikan terhadap kinerja secara keseluruhan dan dapat disebabkan oleh faktor administratif atau penyesuaian kebijakan. Secara umum, indikator ini mencerminkan bahwa **dukungan administrasi, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian telah berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.**

4. Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Realisasi indikator ini menunjukkan **capaian maksimal dan konsisten, yaitu 100% pada Tahun 2022–2025.** Hal ini menandakan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik telah **dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan.**

Capaian ini juga mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program, serta sinergi antarunit kerja dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

5. Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator **Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** menunjukkan capaian **100% secara konsisten** pada Tahun 2022–2025. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan rencana kerja.

Capaian penuh ini mencerminkan keberhasilan program dalam meningkatkan **partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan desa/kelurahan, serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan.**

6. Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Realisasi indikator ini juga menunjukkan **capaian 100% secara berkelanjutan** pada Tahun 2022–2025. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan telah berjalan sesuai standar operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian tersebut mencerminkan adanya **koordinasi yang baik dengan aparat keamanan dan unsur terkait,** serta responsivitas terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

7. Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan

Indikator **Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan** menunjukkan capaian **100% pada Tahun 2022–2025**. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan kecamatan telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian ini menggambarkan stabilitas dan konsistensi kinerja kecamatan dalam menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kerja.

8. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Berjalan Sesuai Standar dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Realisasi indikator ini menunjukkan **capaian 100% secara konsisten** pada Tahun 2022–2025. Hal ini menandakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa telah berjalan efektif, sehingga seluruh desa mampu menyelenggarakan pemerintahan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Capaian ini mencerminkan keberhasilan program pembinaan pemerintahan desa dalam meningkatkan **kepatuhan regulasi, tertib administrasi, serta kualitas tata kelola pemerintahan desa**.

Kesimpulan Umum

Secara keseluruhan, indikator kinerja program menunjukkan:

- **Kinerja pelayanan publik yang terus meningkat**, tercermin dari tren positif IKM.
- **Stabilitas dan konsistensi capaian program**, dengan mayoritas indikator mencapai **100%**.
- **Perbaikan bertahap akuntabilitas kinerja**, meskipun masih memerlukan penguatan untuk meningkatkan nilai AKIP.

Perbandingan Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

- **IKM Tahun 2025 meningkat sebesar 0,93 poin dibandingkan Tahun 2024**, menunjukkan peningkatan kepuasan masyarakat yang cukup signifikan.

- **AKIP Tahun 2025 belum dapat dibandingkan secara kuantitatif**, namun berdasarkan tren dua tahun terakhir, kinerja akuntabilitas menunjukkan arah perbaikan dan stabilitas pada predikat B.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap Renstra Kecamatan Kalaena sebagai berikut:

Tabel 3.4.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Kecamatan Nuha 2025-2029

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi Tw IV | Target Renstra |
|----|--|--|--------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Nuha | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 81,50 | 81,95 | 82,65 |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan (berdasarkan LHE Tw III 2025) | Nilai Akip | 66 | 63,54 | 70,50 |
| | Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi | Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar | 100% | 99,40% | 100% |
| | Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik | Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 100% | 100% | 100% |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi Tw IV | Target Renstra |
|----|--|--|--------|--------------------|-------------------|
| | Meningkatnya pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan | 100% | 100% | 100% |
| | Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Persentase Capaian Kinerja Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | 100% | 100% | 100% |
| | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan | 100% | 100% | 100% |
| | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku | 100% | 100% | 100% |

Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Kecamatan Nuha 2025–2029

1. Sasaran: Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Nuha

Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target IKM Tahun 2025 ditetapkan sebesar **81,50**, dengan realisasi pada TW IV mencapai **81,95**. Capaian ini menunjukkan bahwa target tahunan telah **terlampau sebesar 0,45 poin**. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan **Target Akhir Renstra sebesar 82,65**, capaian Tahun 2025 masih berada **0,70 poin di bawah target akhir**.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja pelayanan publik telah berada pada jalur yang tepat, namun masih diperlukan **upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan** agar target akhir Renstra dapat tercapai pada periode 2029.

2. Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Indikator: Nilai AKIP

Target Nilai AKIP Tahun 2025 ditetapkan sebesar **66**, sedangkan realisasi pada TW IV **belum dirilis**. Oleh karena itu, capaian kinerja indikator ini **belum dapat dibandingkan secara kuantitatif** dengan target tahunan maupun **Target Akhir Renstra sebesar 70,50**.

Meskipun demikian, berdasarkan tren capaian pada tahun-tahun sebelumnya yang berada pada predikat **B**, diperlukan penguatan pada aspek **perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan pelaporan kinerja** agar peningkatan nilai AKIP dapat diarahkan secara konsisten menuju target akhir Renstra.

3. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi

Indikator: Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar

Target indikator pada Tahun 2025 sebesar **100%**, dengan realisasi TW IV mencapai **99,40%**. Capaian ini menunjukkan bahwa target hampir sepenuhnya tercapai, meskipun masih terdapat **selisih kecil sebesar 0,53%** dibandingkan target tahunan maupun **Target Akhir Renstra sebesar 100%**.

Secara umum, indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi penunjang perangkat daerah telah berjalan sangat baik, dan selisih yang terjadi tidak berdampak signifikan terhadap kinerja secara keseluruhan.

4. Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Target Tahun 2025 ditetapkan sebesar **100%**, dan realisasi TW IV juga mencapai **100%**, sama dengan **Target Akhir Renstra sebesar 100%**. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ini telah **tercapai sepenuhnya dan konsisten**.

Capaian tersebut mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program, serta kesesuaian antara target tahunan dan target strategis Renstra.

5. Sasaran: Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Realisasi indikator ini pada Tahun 2025 mencapai **100%**, sesuai dengan target tahunan dan **Target Akhir Renstra sebesar 100%**. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan perencanaan jangka menengah.

6. Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Capaian kinerja Tahun 2025 mencapai **100%**, sama dengan target tahunan dan **Target Akhir Renstra sebesar 100%**. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Nuha telah berjalan sesuai standar dan mampu memenuhi target strategis yang ditetapkan.

7. Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan

Realisasi indikator pada Tahun 2025 mencapai **100%**, sesuai dengan target tahunan dan target akhir Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Nuha telah terlaksana secara optimal dan konsisten.

8. Sasaran: Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator: Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Berjalan Sesuai Standar dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Realisasi indikator pada Tahun 2025 mencapai **100%**, sesuai dengan target tahunan dan **Target Akhir Renstra sebesar 100%**. Capaian ini mencerminkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Kecamatan Nuha.

Kesimpulan Umum

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa:

- Sebagian besar indikator telah **mencapai atau mendekati Target Akhir Renstra**.
- Indikator **IKM** telah melampaui target tahunan namun masih memerlukan peningkatan untuk mencapai target akhir Renstra.
- Indikator **Nilai AKIP** masih memerlukan perhatian khusus karena realisasi belum tersedia dan target akhir Renstra relatif lebih tinggi.
- Indikator lainnya menunjukkan **kinerja optimal dan konsisten** dengan capaian 100%.

Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa Kecamatan Nuha berada pada **jalur yang tepat** dalam pencapaian sasaran Renstra 2025–2029, dengan fokus perbaikan utama pada **peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja**.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Regional/Nasional

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, analisis terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi langkah penting untuk menilai sejauh mana pelayanan pemerintah memenuhi harapan warga. Perbandingan IKM antar kecamatan dalam satu wilayah kabupaten memberikan gambaran menyeluruh mengenai variasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Melalui perbandingan ini, dapat diidentifikasi kecamatan dengan kinerja pelayanan terbaik serta wilayah yang memerlukan peningkatan, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan strategi peningkatan mutu pelayanan publik di tingkat kabupaten.

Berikut tabel perbandingan IKM dengan Kecamatan yang ada dalam wilayah Kab. Luwu Timur:

Tabel 3.5**Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan Target Nasional**

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
|----|---|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | NASIONAL | 78,8 |
| | | Kec. Nuha | 81,37 |
| | | | |
| 2 | Nilai AKIP | NASIONAL | 81,15 |
| | (berdasarkan LHE tw III 2025 Kec. Nuha) | NUHA | 63,54 |
| | | | |

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

Berdasarkan Tabel 3.5, capaian kinerja Kecamatan Nuha Tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi jika dibandingkan dengan target nasional, baik pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) maupun Nilai AKIP.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target nasional Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 ditetapkan sebesar 78,8. Adapun realisasi IKM Kecamatan Nuha pada tahun 2025 mencapai 81,37.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi IKM Kecamatan Nuha telah melampaui target nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Nuha dinilai baik oleh masyarakat, serta telah memenuhi bahkan melebihi standar nasional yang ditetapkan. Pencapaian ini juga mencerminkan adanya upaya perbaikan layanan, peningkatan responsivitas aparatur, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan yang berlaku.

2. Nilai AKIP

Target nasional Nilai AKIP tahun 2025 adalah 81,15, sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Triwulan III Tahun 2025, Nilai AKIP Kecamatan Nuha tercatat sebesar 63,54.

Jika dibandingkan dengan target nasional, realisasi Nilai AKIP Kecamatan Nuha masih berada di bawah standar nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja di Kecamatan Nuha masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek perencanaan kinerja, keterkaitan antara program dan sasaran strategis, pengukuran kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam pengambilan keputusan.

Kesimpulan Analisis

Secara umum, Kecamatan Nuha telah menunjukkan kinerja yang sangat baik pada aspek pelayanan publik, tercermin dari capaian IKM yang melampaui target nasional. Namun demikian, pada aspek akuntabilitas kinerja, masih diperlukan upaya penguatan dan pembenahan agar capaian Nilai AKIP dapat meningkat dan mendekati bahkan memenuhi target nasional di tahun-tahun mendatang.

Upaya perbaikan dapat difokuskan pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja, penguatan cascading kinerja, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan..

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Nilai AKIP

Target : 66

Realisasi : 63,54

Capaian : 96,27%

Analisis:

Realisasi Nilai AKIP belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Capaian sebesar 96,27% menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan **cukup baik**, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang mempengaruhi hasil evaluasi berdasarkan LHE Triwulan III Tahun 2025.

Penyebab belum tercapainya target:

- Keterkaitan (cascading) antara sasaran strategis, program, kegiatan, dan subkegiatan belum sepenuhnya kuat dan konsisten.
- Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi kinerja dalam pengambilan keputusan belum optimal.
- Kualitas indikator kinerja pada beberapa kegiatan masih berorientasi pada output, belum sepenuhnya pada outcome.
- Perbaikan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkelanjutan.

Tren kinerja :

Nilai AKIP menunjukkan **peningkatan dibandingkan periode sebelumnya**, namun peningkatan tersebut belum cukup signifikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Solusi alternatif:

- Penguatan perencanaan kinerja berbasis outcome dan penyelarasan indikator kinerja lintas level.
- Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik.
- Peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan dokumen SAKIP dan LKIP.
- Penajaman program dan kegiatan agar lebih berkontribusi langsung terhadap sasaran strategis.

2. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target : 81,50

Realisasi : 82,23

Capaian : 100,89%

Analisis:

Realisasi IKM telah **melampaui target**, menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan telah dinilai **baik** oleh masyarakat.

Penyebab keberhasilan:

- Penerapan standar pelayanan yang konsisten dan sesuai ketentuan.
- Peningkatan responsivitas aparatur dalam melayani masyarakat.
- Perbaikan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.
- Adanya mekanisme pengaduan dan umpan balik masyarakat yang berjalan efektif.

Tren kinerja :

Capaian IKM menunjukkan **tren peningkatan**, yang mencerminkan keberhasilan upaya perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Solusi penguatan :

- Mempertahankan kualitas pelayanan yang telah berjalan baik.
- Menindaklanjuti hasil survei IKM sebagai dasar perbaikan layanan.
- Mendorong inovasi pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat.

Analisis Sasaran Program**3. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi**

Indikator : Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar

Target : 100%

Realisasi : 99,40%

Capaian : 99,40%

Analisis:

Capaian hampir memenuhi target, namun terdapat sebagian kecil kegiatan yang belum sepenuhnya berjalan sesuai standar.

Penyebab:

- Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan sebagian kegiatan penunjang.
- Penyesuaian administrasi dan pelaporan yang belum sepenuhnya tepat waktu.

Solusi alternatif:

- Peningkatan koordinasi antar unit kerja.
- Penguatan pengendalian internal dan penjadwalan kegiatan yang lebih efektif.

4. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator: Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Target/Realisasi/Capaian: 100%

Analisis:

Target telah tercapai sepenuhnya, menunjukkan pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan **efektif dan sesuai rencana**.

Faktor keberhasilan:

- Perencanaan program yang jelas dan terukur.
- Koordinasi internal yang baik.

Solusi penguatan:

- Menjaga konsistensi pelaksanaan dan kualitas pelayanan.

5. Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator : Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat
Target/Realisasi/Capaian : 100%

Analisis:

Seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan sesuai target.

Penyebab keberhasilan:

- Keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan.
- Sinkronisasi program dengan kebutuhan lokal.

Solusi penguatan:

- Peningkatan kualitas dampak pemberdayaan masyarakat.

6. Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Indikator : Persentase capaian kinerja pelayanan trantibum

Target/Realisasi/Capaian: 100%

Analisis:

Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum berjalan optimal dan sesuai target.

Solusi penguatan:

- Mempertahankan sinergi dengan aparat keamanan dan masyarakat.

7. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator : Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum
Target/Realisasi/Capaian: 100%

Analisis:

Seluruh urusan pemerintahan umum terlaksana sesuai rencana.

Solusi penguatan:

- Peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor.

8. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator: Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan
Target/Realisasi/Capaian: 100%

Analisis:

Pembinaan dan pengawasan desa berjalan efektif dan sesuai regulasi.

Solusi penguatan:

- Penguatan monitoring dan pendampingan berkelanjutan.

Kesimpulan Umum

Secara keseluruhan, **kinerja Kecamatan pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik**, dengan mayoritas indikator mencapai bahkan melampaui target. Tantangan utama masih terdapat pada **Nilai AKIP**, sehingga ke depan perlu difokuskan pada penguatan sistem akuntabilitas kinerja agar selaras dengan capaian pelayanan publik yang sudah optimal.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumber daya pada tingkat kecamatan merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan wilayah dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Sumber daya yang

dimaksud mencakup sumber daya manusia dan keuangan, serta infrastruktur. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kecamatan mampu memanfaatkan sumber daya tersebut secara optimal guna meningkatkan kualitas pelayanan public

Tabel 3.6

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja dan anggaran

| NO | SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | CAPAIAN | |
|--------|--|------------|----------------|--------------------------------|------------|----------------|-------------|--------------|
| | | KINERJA | ANGGARAN (Rp.) | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN(Rp) | KINERJA | ANGGARAN (Rp.) | KINERJA (%) | ANGGARAN (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7=(5/4) | 8=(6/4) |
| I. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 100 % | 3,760,959,558 | 3,584,477,458 | 99,40% | 3,402,712,512 | 99,40 % | 94.9% |
| I.1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 29,868,300 | 32,961,450 | 100% | 32,526,950 | 100% | 98.7% |
| I.1.1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 16,810,900 | 17,909,000 | 2 Dokumen | 17,706,500 | 100 % | 98.9% |
| I.1.2. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 2,778,100 | 2,263,650 | 2 Dokumen | 2,213,650 | 100% | 97.8% |
| I.1.3. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2 Dokumen | 2,054,900 | 1,641,400 | 2 Dokumen | 1,641,400 | 100% | 100.0% |
| I.1.4. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 8,224,400 | 11,147,400 | 10 Dokumen | 10,965,400 | 100 % | 98.4% |
| I.2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 2,791,510,802 | 2,575,156,052 | 95,23 % | 2,447,765,774 | 100 % | 95.1% |
| I.2.1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang | 2,766,550,802 | 2,550,196,052 | 23 Orang | 2,422,805,774 | 100% | 95.0% |
| I.2.2. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ | 12 Laporan | 24,960,000 | 24,960,000 | 12 Lapor | 24,960,000 | 100% | 100.0% |

| NO | SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | CAPAIAN | |
|-------|--|---------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | | KINERJA | ANGGARAN (Rp.) | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN(Rp) | KINERJA | ANGGARAN (Rp.) | KINERJA (%) | ANGGARAN (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7=(5/4) | 8=(6/4) |
| | Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | an | | | |
| 1.3. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 % | 25,494,500 | 24,822,100 | 12 % | 23,882,100 | 100 % | 96.2% |
| 1.3.1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 25,494,500 | 24,822,100 | 4 Laporan | 23,882,100 | 100% | 96.2% |
| 1.4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | 49,903,750 | 31,763,250 | 100 % | 26,450,010 | 100 % | 83.3% |
| 1.4.1 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Laporan | 19,838,750 | 12,425,250 | 12 Laporan | 12,166,250 | 100 % | 97.9% |
| 1.4.2 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | 7 Orang | 30,065,000 | 19,338,000 | 7 Orang | 14,283,760 | 100% | 73.9% |
| 1.5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 417,531,190 | 519,575,190 | 100% | 506,307,390 | 100 % | 97.4% |
| 1.5.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9 Paket | 7,433,000 | 9,603,000 | 100 Paket | 9,603,000 | 100 % | 100.0% |
| 1.5.2 | Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor | 2 paket | 6,597,500 | 6,597,500 | 2 paket | 6,597,500 | 100% | 100.0% |
| 1.5.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 15 Paket | 9,531,040 | 13,286,040 | 15 Paket | 13,281,040 | 100 % | 100.0% |

| NO | SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | CAPAIAN | |
|-------|--|------------|-------------------|--------------------------------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | | KINERJA | ANGGARAN (Rp.) | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN(Rp) | KINERJA | ANGGARAN (Rp.) | KINERJA (%) | ANGGARAN (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7=(5/4) | 8=(6/4) |
| 1.5.4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 5 Paket | 21,349,650 | 19,858,650 | 5 Paket | 18,018,650 | 100 % | 90.7% |
| 1.5.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 12 Dokumen | 10,920,000 | 10,920,000 | 12 Dokumen | 10,625,000 | 100% | 97.3% |
| 1.5.6 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 164,700,000 | 260,350,000 | 12 Laporan | 253,776,000 | 100 % | 97.5% |
| 1.5.7 | Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 197,000,000 | 198,960,000 | 12 Laporan | 194,406,200 | 100 % | 97.7% |
| 1.6 | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | 100% | 10,300,000 | 10,300,000 | 100% | 9,845,850 | 100% | 95.6% |
| 1.6.1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 unit | 10,300,000 | 10,300,000 | 1 Unit | 9,845,850 | 100% | 95.6% |
| 1.7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 362,331,016 | 315,409,416 | 100 % | 293,410,342 | 100 % | 93.0% |
| 1.7.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 27,732,100 | 28,810,500 | 12 Laporan | 24,401,042 | 100 % | 84.7% |
| 1.7.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Laporan | 34,598,916 | 34,598,916 | 12 Laporan | 18,259,300 | 100% | 52.8% |

| NO | SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | CAPAIAN | |
|-------|---|------------|-------------------|--------------------------------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | | KINERJA | ANGGARAN (Rp.) | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN(Rp) | KINERJA | ANGGARAN (Rp.) | KINERJA (%) | ANGGARAN (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7=(5/4) | 8=(6/4) |
| 1.7.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Laporan | 300,000,000 | 252,000,000 | 12 Laporan | 250,750,000 | 100 % | 99.5% |
| 1.8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah | 100 % | 74,020,000 | 74,490,000 | 100 % | 62,524,096 | 100 % | 83.9% |
| 1.8.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 9 Unit | 39,900,000 | 39,900,000 | 9 Unit | 28,858,971 | 100 % | 72.3% |
| 1.8.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15 Unit | 8,630,000 | 7,880,000 | 15 Unit | 7,006,375 | 100% | 88.9% |
| 1.8.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | 2 Unit | 20,000,000 | 20,000,000 | 2 Unit | 19,995,000 | 100% | 100.0% |
| 1.8.4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | 11 unit | 5,490,000 | 6,710,000 | 11 Unit | 6,663,750 | 100% | 99.3% |

| NO | SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | CAPAIAN | |
|--------|--|---------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | | KINERJA | ANGGRAN(Rp.) | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | KINERJA | ANGGARAN (Rp.) | KINERJA (%) | ANGGARAN (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7=(5/3) | 8=(6/4) |
| 1. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 100% | 8.095.000 | 7,434,850 | 100% | 7,061,750 | 100 % | 95.0% |
| 1.1. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 100% | 8.095.000 | 7,434,850 | 100 % | 7,061,750 | 100 % | 95.0% |
| 1.1.1. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 12 Dokumen | 8.095,000 | 7,434,850 | 12 Dokumen | 7,061,750 | 100% | 95.0% |
| 2. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 100% | 297.275.45 0 | 321,644,950 | 100 % | 315,349,916 | 100% | 98.0% |
| 2.1. | Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa | 100% | 97.275.45 0 | 121,644,950 | 100 % | 116,209,416 | 100% | 95.5% |
| 2.1.1. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa | 2 | 17.807.85 0 | 16,030,050 | 2 Lembaga Kemasyar akatan | 15,263,050 | 100 % | 95.2% |
| 2.1.2. | Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | 4 | 79.467.60 0 | 105,614,900 | 4 Laporan | 100,946,366 | 100 % | 95.6% |

| NO | SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | CAPAIAN | |
|--------|---|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | | KINERJA | ANGGRAN(Rp.) | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | KINERJA | ANGGARAN (Rp.) | KINERJA (%) | ANGGARAN (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7=(5/3) | 8=(6/4) |
| 2.2. | Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 100 % | 200.000.0 00 | 200,000,000 | 100% | 199,140,500 | 100% | 99.6% |
| 2.1.1. | Pemberdayaan masyarakat dikelurahan | 2 Lembaga Kemasyar akatan | 200.000.0 00 | 200,000,000 | 2 Lembaga Kemasyar akatan | 199,140,500 | 100 % | 99.6% |
| 3. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 100 % | 16.079.50 0 | 20,050,850 | 100 % | 19,862,250 | 100 % | 99.1% |
| 3.1. | Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | 11.889.70 0 | 16,495,400 | 100% | 16,404,000 | 100 % | 99.4% |
| 3.1.1. | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan | 7.724.150 | 13,744,900 | 4 Laporan | 13,664,000 | 100 % | 99.4% |
| 3.1.2. | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 4 Laporan | 4.165.550 | 2,750,500 | 4 Laporan | 2,740,000 | 100 % | 99.6% |
| 3.2. | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100 % | 4.189.800 | 3,555,450 | 100 % | 3,458,250 | 100 % | 97.3% |
| 3.2.1. | Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang | 4 Laporan | 4.189.800 | 3,555,450 | 4 Laporan | 3,458,250 | 100 % | 97.3% |

| NO | SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | CAPAIAN | |
|--------|---|------------|------------------|----------------------------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | | KINERJA | ANGGRAN(Rp.) | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | KINERJA | ANGGARAN (Rp.) | KINERJA (%) | ANGGARAN (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7=(5/3) | 8=(6/4) |
| | Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau POLRI | | | | | | | |
| 4. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 100 % | 35.263.050 | 32,623,000 | 100 % | 32,163,500 | 100 % | 98.6% |
| 4.1.1. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 % | 35.263.050 | 32,623,000 | 100 % | 32,163,500 | 100 % | 98.6% |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Laporan | 35.263.050 | 32,623,000 | 12 Laporan | 32,163,500 | 100% | 98.6% |
| 5. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 100 % | 10.333.200 | 10,291,350 | 100 % | 9,886,950 | 100 % | 96.1% |
| 5.1. | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 % | 10.333.200 | 10,291,350 | 100% | 9,886,950 | 100 % | 96.1% |
| 5.1.1. | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 4 Laporan | 3.044.500 | 2,787,150 | 4 Laporan | 2,767,750 | 100 % | 99.3% |
| 5.1.2. | Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan | 12 Laporan | 7.288.700 | 7,504,200 | 12 Laporan | 7,119,200 | 100% | 94.9% |

➤ Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Secara umum, efisiensi pemanfaatan SDM Kecamatan Nuha tergolong sangat baik. Hal ini tercermin dari:

- ✚ Capaian kinerja program dan kegiatan rata-rata mencapai 100%, meskipun terdapat penyesuaian dan efisiensi anggaran pada hampir seluruh sub kegiatan. Dengan jumlah pegawai yang relatif terbatas (21 orang), Kecamatan mampu menyelesaikan seluruh target output, baik administrasi pemerintahan, pelayanan publik, ketenteraman dan ketertiban umum, hingga pemberdayaan masyarakat.
- ✚ Distribusi peran SDM berjalan optimal, di mana:
 - Pejabat struktural (8 orang) berperan efektif dalam fungsi koordinasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan.
 - PNS dan PPPK pelaksana (11 orang) mampu menangani beban kerja teknis-administratif yang cukup tinggi, termasuk penyusunan dokumen perencanaan, laporan keuangan, pelayanan publik, serta fasilitasi kegiatan masyarakat.
 - Tenaga cleaning service (2 orang) mendukung keberlangsungan operasional kantor tanpa menambah beban biaya berlebih.

☐ Kesimpulan SDM: Kecamatan mampu memaksimalkan kapasitas SDM yang ada secara efisien dan produktif, tanpa penambahan pegawai, serta tetap menghasilkan kinerja yang optimal.

➤ Analisis Efisiensi Sumber Daya Keuangan

Dari sisi keuangan, pelaksanaan program menunjukkan efisiensi anggaran yang signifikan tanpa menurunkan capaian kinerja, dengan indikator sebagai berikut:

- ✚ Rasio efisiensi anggaran mayoritas berada pada kisaran 94%–99%, bahkan pada beberapa sub kegiatan berada di bawah 90%, namun kinerja tetap mencapai 100%. Contohnya:
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik dengan realisasi anggaran sekitar 52,8%, namun capaian kinerja tetap 100%.
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan efisiensi anggaran hingga 83,3%, tetap menghasilkan output sesuai target.
- ✚ Program penunjang urusan pemerintahan daerah sebagai penyerap anggaran terbesar menunjukkan efisiensi yang baik, dengan realisasi anggaran sekitar 94,9% dan capaian kinerja 99,47%, menandakan pengelolaan belanja yang efektif dan terkendali.
- ✚ Efisiensi juga terlihat pada program-program substantif seperti:

- Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (realisasi ±95%),
- Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (±98%),
- Ketenteraman dan ketertiban umum (±99%),
- Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (±96%).

✚ Penghematan anggaran diperoleh melalui:

- Penyesuaian volume dan kebutuhan riil kegiatan,
- Optimalisasi sarana dan prasarana yang telah tersedia,
- Pengendalian belanja operasional dan jasa penunjang.

☐ Kesimpulan Keuangan: Anggaran digunakan secara hemat, tepat sasaran, dan proporsional, dengan hasil kinerja yang tetap maksimal.

➤ Kesimpulan Umum Efisiensi Sumber Daya

Secara keseluruhan, Kecamatan menunjukkan tingkat efisiensi sumber daya yang sangat baik, ditandai dengan:

- ✚ Kinerja hampir seluruh program dan kegiatan mencapai 100%,
- ✚ Realisasi anggaran lebih rendah dari pagu setelah efisiensi,
- ✚ SDM yang terbatas mampu mengelola beban kerja lintas program secara optimal.

Efisiensi ini mencerminkan pengelolaan organisasi yang efektif, perencanaan yang matang, serta komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, meskipun dalam kondisi keterbatasan sumber daya.

G. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis program yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja merupakan langkah penting dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi sejauh mana program yang dijalankan berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat atau pendukung keberhasilannya. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk perbaikan strategi, peningkatan efisiensi, dan penguatan akuntabilitas kinerja di masa mendatang

➤ Analisis Program yang Menunjang Sasaran 1

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- Sasaran Program:

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- Indikator Sasaran Progra:

Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

- **Target Kinerja** : 100%
- **Realisasi Kinerja** : 100%
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Program:**

| | | |
|---|---|---|
| Persentase Capaian Indikator Kinerja Program | = | $\frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Per Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$ |
| | = | $\frac{100}{100} \times 100$ |
| | = | 100% |

- **Capaian kinerja** : 100%
- **Predikat Kinerja** : **sangat tinggi**

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung dengan 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yang dijelaskan sebagai berikut:

-

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung oleh 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- **Sasaran Program:**

Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa

- **Indikator Sasaran Program:**

Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan.

- **Target Kinerja** : 100%
- **Realisasi Kinerja** : 100%
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Program:**

| | | |
|---|---|---|
| Persentase Capaian Indikator Kinerja Program | = | $\frac{\text{Jumlah Rata-rata Realisasi Kinerja Per Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$ |
| | = | $\frac{(100+100)/2}{100} \times 100$ |
| | = | 100% |

- **Capaian kinerja** : 100%
- **Predikat Kinerja** : **Sangat tinggi**

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung dengan 2 (Dua) Kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- **Sasaran Program:**

Meningkatnya Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- **Indikator Sasaran Program:**

Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- **Target Kinerja :** 100%.

- **Realisasi Kinerja:** 100%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Program:**

| | | |
|---|---|---|
| Persentase Capaian Indikator Kinerja Program | = | $\frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$ |
| | = | $\frac{((100 + 100) / 2)}{100} \times 100$ |
| | = | 100% |

- **Capaian kinerja :**100%.

- **Predikat Kinerja :** Tinggi.

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung oleh 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan analisis sebagai berikut:

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

- **Sasaran Program:**

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

- **Indikator Sasaran Program:**

Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan

- **Target Kinerja :** 100%.

- **Realisasi Kinerja:** 100%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Program:**

| | | |
|---|---|---|
| Persentase Capaian Indikator Kinerja Program | = | $\frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$ |
| | = | $\frac{100}{100} \times 100$ |
| | = | 100% |

- **Capaian kinerja :** 100%.

- **Predikat Kinerja : Sangat Tinggi .**

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan analisis sebagai berikut:

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- **Sasaran Program:**

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- **Indikator Sasaran Program:**

Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku

- **Target Kinerja : 100%.**
- **Realisasi Kinerja: 75%**
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Program:**

| | | |
|---|---|---|
| Persentase Capaian Indikator Kinerja Program | = | $\frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$ |
| | = | $\frac{100}{100} \times 100$ |
| | = | 100% |

- **Capaian kinerja : 100%.**
- **Predikat Kinerja : Sangat Tinggi.**

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan dengan analisis

➤ Analisis Program yang Menunjang Sasaran 2

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

- **Sasaran Program:**

Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar

- **Indikator Sasaran Program:**

Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku

- **Target Kinerja : 100%.**
- **Realisasi Kinerja: 99,40%**
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Program:**

| | |
|---|---|
| Persentase Capaian Indikator Kinerja Program | $= \frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$ |
| | $= \frac{((100 + 95,23 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 8)}{100} \times 100$ |
| | $= 99,40\%$ |

- **Capaian kinerja : 100 %.**
- **Predikat Kinerja : Sangat tinggi.**

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung oleh 7 (Tujuh) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan

3.2. REALISASI ANGGARAN

Jumlah anggaran Kecamatan Nuha Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan melalui APBD Perubahan adalah sebesar **Rp 3,976,522,458,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 3,787,036,878,-** dengan capaian realisasi anggaran sebesar **95,23%**. Gambaran realisasi anggaran Kantor Kecamatan Nuha Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12.

Realisasi Anggaran Kecamatan Nuha Tahun 2025

| No | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN |
|-------|---|-----------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (4/3)*100 |
| I. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3,584,477,458 | 3,402,712,512 | 94.9% |
| I.1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 32,961,450 | 32,526,950 | 98.7% |
| I.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 17,909,000 | 17,706,500 | 98.9% |
| I.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2,263,650 | 2,213,650 | 97.8% |
| I.1.3 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1,641,400 | 1,641,400 | 100.0% |
| I.1.4 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11,147,400 | 10,965,400 | 98.4% |
| I.2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,575,156,052 | 2,447,765,774 | 95.1% |
| I.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2,550,196,052 | 2,422,805,774 | 95.0% |
| I.2.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 24,960,000 | 24,960,000 | 100.0% |
| I.3. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 24,822,100 | 23,882,100 | 96.2% |

| No | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN |
|-------|---|-----------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (4/3)*100 |
| I.3.1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 24,822,100 | 23,882,100 | 96.2% |
| I.4. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 31,763,250 | 26,450,010 | 83.3% |
| I.4.1 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12,425,250 | 12,166,250 | 97.9% |
| I.4.2 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | 19,338,000 | 14,283,760 | 73.9% |
| I.5. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 519,575,190 | 506,307,390 | 97.4% |
| I.5.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9,603,000 | 9,603,000 | 100.0% |
| I.5.2 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 6,597,500 | 6,597,500 | 100.0% |
| I.5.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 13,286,040 | 13,281,040 | 100.0% |
| I.5.4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 19,858,650 | 18,018,650 | 90.7% |
| I.5.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 10,920,000 | 10,625,000 | 97.3% |
| I.5.6 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 260,350,000 | 253,776,000 | 97.5% |
| I.5.7 | Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD | 198,960,000 | 194,406,200 | 97.7% |
| I.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 10,300,000 | 9,845,850 | 95.6% |
| I.6.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10,300,000 | 9,845,850 | 95.6% |
| I.6.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 315,409,416 | 293,410,342 | 93.0% |
| I.6.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 28,810,500 | 24,401,042 | 84.7% |
| I.7. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah | 34,598,916 | 18,259,300 | 52.8% |
| I.7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 252,000,000 | 250,750,000 | 99.5% |
| I.7.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 74,490,000 | 62,524,096 | 83.9% |
| I.7.3 | Pemeliharaan/rehabilitasi Bangunan Gedung/kantor | 39,900,000 | 28,858,971 | 72.3% |
| I.7.4 | Pemeliharaan sarana Dan Prasarana Gedung/kantor | 7,880,000 | 7,006,375 | 88.9% |
| II. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 7,434,850 | 7,061,750 | 95.0% |
| II.1. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 7,434,850 | 7,061,750 | 95.0% |

| No | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN |
|---------|--|-----------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (4/3)*100 |
| II.1.1 | Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 7,434,850 | 7,061,750 | 95.0% |
| III. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 321,644,950 | 315,349,916 | 98.0% |
| III.1. | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 121,644,950 | 116,209,416 | 95.5% |
| III.1.1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 16,030,050 | 15,263,050 | 95.2% |
| III.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 105,614,900 | 100,946,366 | 95.6% |
| III.2. | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 200,000,000 | 199,140,500 | 99.6% |
| III.2.1 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 200,000,000 | 199,140,500 | 99.6% |
| IV. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 20,050,850 | 19,862,250 | 99.1% |
| IV.1. | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 16,495,400 | 16,404,000 | 99.4% |
| IV.1.1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 13,744,900 | 13,664,000 | 99.4% |
| IV.1.2 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 2,750,500 | 2,740,000 | 99.6% |
| IV.2. | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 3,555,450 | 3,458,250 | 97.3% |
| IV.2.1 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 3,555,450 | 3,458,250 | 97.3% |
| V. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 32,623,000 | 32,163,500 | 98.6% |
| V.1. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 32,623,000 | 32,163,500 | 98.6% |
| V.1.1 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 32,623,000 | 32,163,500 | 98.6% |
| VI. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 10,291,350 | 9,886,950 | 96.1% |

| No | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN |
|--------|---|-----------------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (4/3)*100 |
| VI.1. | Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 10,291,350 | 9,886,950 | 96.1% |
| VI.1.1 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 2,787,150 | 2,767,750 | 99.3% |
| VI.1.2 | Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan | 7,504,200 | 7,119,200 | 94.9% |

3.3 REKOMENDASI

Berdasarkan Laporan hasil Evaluasi LKj Triwulan III Kecamatan Nuha Nomor 700.1.2.1/635/XII/ITKAB Tanggal 24 Desember 2025 terdapat hal-hal yang disarankan/direkomendasikan kepada Kecamatan Nuha diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan Informasi dalam Laporan Kinerja menjadi Kepedulian Seluruh Pegawai (SKP)
2. Melampirkan Daftar Hadir dan Notula hasil Rapat pada Laporan Berkala
3. Melaksanakan Evaluasi Mandiri pada Tingkat OPD untuk Triwulan Selanjutnya

3.4 TINDAK LANJUT

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi LKj Triwulan III Kecamatan Nuha Nomor 700.1.2.1/635/XII/ITKAB tanggal 24 Desember 2025, Kecamatan Nuha menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menjadikan Informasi dalam Laporan Kinerja sebagai Kepedulian Seluruh Pegawai (SKP)

Kecamatan Nuha akan mengintegrasikan informasi dan capaian kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja ke dalam perencanaan dan pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Setiap pegawai akan didorong untuk memahami peran dan kontribusinya terhadap pencapaian kinerja organisasi, sehingga laporan kinerja tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi acuan bersama dalam peningkatan kinerja individu dan unit kerja secara berkelanjutan.

2. Melampirkan Daftar Hadir dan Notula Hasil Rapat pada Laporan Berkala

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kelengkapan administrasi pelaporan, Kecamatan Nuha akan memastikan setiap laporan berkala dilengkapi dengan daftar hadir dan notula hasil rapat yang relevan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat bukti dukung pelaksanaan kegiatan serta menjamin keterlacakan proses pengambilan keputusan dan tindak lanjut hasil rapat.

3. Melaksanakan Evaluasi Mandiri pada Tingkat OPD untuk Triwulan Selanjutnya

Kecamatan Nuha akan melaksanakan evaluasi mandiri secara berkala pada tingkat OPD pada setiap triwulan. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi capaian, permasalahan, serta peluang perbaikan sejak dini, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana tindak lanjut dan peningkatan kualitas kinerja pada triwulan berikutnya.

Melalui pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, Kecamatan Nuha berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

BAB IV

PENUTUP

Ppihaada Triwulan IV Tahun 2025, Kecamatan Nuha telah melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pelaksanaan tersebut menunjukkan capaian kinerja yang secara umum berada pada jalur yang positif, baik dari aspek peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, maupun efisiensi penggunaan anggaran. Berbagai upaya perbaikan dan penyesuaian strategi yang dilakukan sepanjang periode pelaporan turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pelaksanaan program.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian, seperti keterbatasan sumber daya, dinamika kebutuhan masyarakat, serta beberapa hambatan teknis di lapangan. Tantangan ini menjadi evaluasi penting bagi perangkat kecamatan dalam merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang lebih tepat sasaran pada triwulan berikutnya. Sinergi dan kolaborasi antarperangkat kecamatan, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat semakin diperkuat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan IV ini, Kecamatan Nuha berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan efektif. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi berkelanjutan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Melalui kerja sama dan dukungan semua pihak, Kecamatan Nuha optimis dapat menghadirkan kinerja pemerintahan yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sorowako, 10 Januari 2026



ARIET FADILLAH AMIER, S.Kom, M.Si.

Pangkat : Pembina

NIP. 19810204 200902 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN NUHA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIEF FADILLAH AMIER,S.Kom.,M.Si

Jabatan : CAMAT NUHA

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ir.H.IRWAN BACHRI SYAM.ST.IPM

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Luwu Timur, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ir.H.IRWAN BACHRI SYAM.ST.IPM

ARIEF FADILLAH AMIER,S.Kom.,M.Si

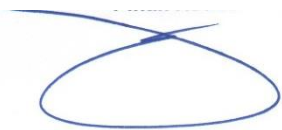
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN NUHA
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Target |
|-----------|--|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | SASARAN | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Nilai Akip Perangkat Daerah | 66 Nilai |
| 2 | meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) | 81,5 Nilai |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi | Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar | 100% |
| 4 | Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik | Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 100 % |
| 5 | Meningkatnya pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 % |
| 6 | Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum | 100 % |
| 7 | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan | 100 % |
| 8 | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku | 100 % |
| | | | |
| | | | |

| | Program | Anggaran |
|---|---|---------------|
| | Program | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.584.477.458 |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 7.434.850 |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 321.644.950 |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 20.050.850 |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 32.623.000 |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 10.291.350 |
| | | |

Luwu Timur, 01 Oktober 2025

BUPATI LUWU TIMUR



Ir.H.IRWAN BACHRI SYAM.ST.IPM

CAMAT NUHA



ARIEF FADILLAH AMIER,S.Kom.,M.Si

Lampiran 2

Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN NUHA

Alamat : Jln. Diponegoro No. 02 Sorowako 92984 Email :
kcn.lutimkab@gmail.com

Sorowako, 06 Januari 2026

Nomor : 000.7.2.10/005/KCN
Lampiran : -
Hal : **Undangan Rapat**
Yth.
1. Sekertaris Camat
2. Kepala Seksi/Kasubag Kec.Nuha
3. Staf Kec.Nuha
di_
Tempat

Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan **Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV dan Penyusunan LAKIP 2025**, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Januari 2026
Pukul : 10.00 Wita-Selesai
Tempat : Aula Kantor Camat Nuha

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan banyak terimakasih.



CAMAT NUHA,

ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom.M.Si

Pangkat: Pembina

NIP. 19810204 2009021 001

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab.Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Luwu Timur di Malili.




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN NUHA

Jalan Diponegoro No.02 Sorowako 92984 Sulawesi Selatan

DAFTAR HADIR
MONITORING EVALUASI RKPD TW. IV/LAKIP/LKPJ

| No | NAMA | JABATAN | JENIS KELAMIN | | TANDA TANGAN | KET |
|----|-------------------|-----------------------|---------------|---|--------------|-----|
| | | | P | L | | |
| 1 | Arif Fadilah Amir | Camat Nuha | L | | | |
| 2 | Kamil R. | SEKAS | L | | | |
| 3 | Raftrawati | Kasi. Permentaka | P | | | |
| 4 | Fatimah | Kasi TRANSIB | P | | | |
| 5 | Kasmiati | stap | P | | | |
| 6 | Syamsi Syam | -.- | P | | | |
| 7 | Husna | slp | P | | | |
| 8 | HASNIAH | PERENCANA | P | | | |
| 9 | Celly m. | Bendahara | P | | | |
| 10 | Rany Syam | Kasi. Pelaya Um | P | | | |
| 11 | Duburak | STAF | P | | | |
| 12 | Emmy. A. | STAF | P. | | | |
| 13 | Lina | Kasub. Cag. Um + Keri | P | | | |
| 14 | Ira Puspa | Kasi PND | P | | | |
| 15 | Ekawati | STAF | P | | | |
| 16 | SEPI WAHYUNI | STAF | P | | | |
| 17 | Heni. A. | Staf. | P. | | | |
| 18 | Harmindrawaty | staf | P | | | |
| 19 | Harkini | stap | P | | | |
| 20 | | | | | | |

Mengetahui
Camat Nuha

ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom.M.Si
Nip. 198102042009021001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN NUHA

Jalan Diponegoro No.02 Sorowako 92984 Sulawesi Selatan

BERITA ACARA HASIL DESK EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Aula Kantor Camat Nuha yang bertanda-tangan dibawah ini :

I. Nama : **KAMIL RASYID, ST**
Nip : 19810511 200902 1 001
Jabatan : Sekretaris Camat
Alamat : Magani
Bertindak atas nama Camat Nuha untuk melakukan evaluasi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : **IRA PUSPA, SE**
Nip : 19801227 200902 2 002
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Alamat : Sorowako
Bertindak sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Nuha untuk dilakukan evaluasi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sesuai dengan hasil Desk Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan IV serta mencermati format pengendalian dan evaluasi RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 Triwulan IV, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

| No. | Uraian | Jumlah | Realisasi | Presentase |
|-----|--------------|----------------|----------------|------------|
| 1. | Anggaran | Rp 129.149.150 | Rp 123.328.616 | 95,49 % |
| 2. | Program | 2 | 2 | |
| 3. | Kegiatan | 2 | 2 | |
| 4. | Sub Kegiatan | 3 | 3 | |

Secara rinci catatan permasalahan dan rekomendasi tindak lanjut menjadi lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

PIHAK KEDUA

IRA PUSPA, SE

Nip. 19801227 200902 2 002

PIHAK PERTAMA

KAMIL RASYID, ST

Nip. 19810511 200902 1 001



Mengetahui,
Camat Nuha

ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom

Nip. 198102042009021001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN NUHA

Jalan Diponegoro No.02 Sorowako 92984 Sulawesi Selatan

BERITA ACARA HASIL DESK EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Aula Kantor Camat Nuha yang bertanda-tangan dibawah ini :

I. Nama : **KAMIL RASYID, ST**
Nip : 19810511 200902 1 001
Jabatan : Sekretaris Camat
Alamat : Magani
Bertindak atas nama Camat Nuha untuk melakukan evaluasi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : **FATIMAH, SE**
Nip : 19800101 200502 2 007
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Alamat : Sorowako
Bertindak sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Nuha untuk dilakukan evaluasi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sesuai dengan hasil Desk Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan IV serta mencermati format pengendalian dan evaluasi RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 Triwulan IV, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

| No. | Uraian | Jumlah | Realisasi | Presentase |
|-----|--------------|----------------|----------------|------------|
| 1. | Anggaran | Rp. 20.050.850 | Rp. 19.862.250 | 99,10% |
| 2. | Program | 1 | 1 | |
| 3. | Kegiatan | 2 | 2 | |
| 4. | Sub Kegiatan | 3 | 3 | |

Secara rinci catatan permasalahan dan rekomendasi tindak lanjut menjadi lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

PIHAK KEDUA

FATIMAH, SE

Nip. 19800101 200502 2 007

PIHAK PERTAMA

KAMIL RASYID, ST

Nip. 19810511 200902 1 001



Mengetahui,
Camat Nuha

ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom

Nip. 198102042009021001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN NUHA

Jalan Diponegoro No.02 Sorowako 92984 Sulawesi Selatan

BERITA ACARA HASIL DESK EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Aula Kantor Camat Nuha yang bertanda-tangan dibawah ini :

- I. Nama : **KAMIL RASYID, ST**
Nip : 19810511 200902 1 001
Jabatan : Sekretaris Camat
Alamat : Magani

Bertindak atas nama Camat Nuha untuk melakukan evaluasi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : **RACHMAWATI, S.Kom**
Nip : 19810504 200604 2 017
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Umum
Alamat : Magani

Bertindak sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Umum Kecamatan Nuha untuk dilakukan evaluasi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sesuai dengan hasil Desk Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan IV serta mencermati format pengendalian dan evaluasi RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 Triwulan IV, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

| No. | Uraian | Jumlah | Realisasi | Presentase |
|-----|--------------|---------------|---------------|------------|
| 1. | Anggaran | Rp 35.410.150 | Rp 34.931.250 | 98,64 % |
| 2. | Program | 2 | 2 | |
| 3. | Kegiatan | 2 | 2 | |
| 4. | Sub Kegiatan | 2 | 2 | |

Secara rinci catatan permasalahan dan rekomendasi tindak lanjut menjadi lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

PIHAK KEDUA

RACHMAWATI, S.Kom

Nip. 19810504 200604 2 017

PIHAK PERTAMA

KAMIL RASYID, ST

Nip. 19810511 200902 1 001



Mengetahui,
Camat Nuha

ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom

Nip. 198102042009021001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN NUHA

Jalan Diponegoro No.02 Sorowako 92984 Sulawesi Selatan

BERITA ACARA HASIL DESK EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Aula Kantor Camat Nuha yang bertanda-tangan dibawah ini :

- I. Nama : **KAMIL RASYID, ST**
Nip : 19810511 200902 1 001
Jabatan : Sekretaris Camat
Alamat : Magani
Bertindak atas nama Camat Nuha untuk melakukan evaluasi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama : **HASNIAR, S.Sos**
Nip : 19830305 200604 2 020
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan & Kepegawaian
Alamat : Malili
Bertindak sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kecamatan Nuha untuk dilakukan evaluasi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sesuai dengan hasil Desk Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan IV serta mencermati format pengendalian dan evaluasi RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 Triwulan IV, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

| No. | Uraian | Jumlah | Realisasi | Presentase |
|-----|--------------|----------------|----------------|------------|
| 1. | Anggaran | Rp. 64.724.700 | Rp. 58.976.960 | 91,11 % |
| 2. | Program | 1 | 1 | |
| 3. | Kegiatan | 2 | 2 | |
| 4. | Sub Kegiatan | 6 | 6 | |

Secara rinci catatan permasalahan dan rekomendasi tindak lanjut menjadi lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

PIHAK KEDUA

HASNIAR, S.Sos

Nip. 19830305 200604 2 020

PIHAK PERTAMA

KAMIL RASYID, ST

Nip. 19810511 200902 1 001

Mengetahui,
Camat Nuha

ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom
Nip. 198102042009021001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN NUHA

Jalan Diponegoro No.02 Sorowako 92984 Sulawesi Selatan

BERITA ACARA HASIL DESK EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Aula Kantor Camat Nuha yang bertanda-tangan dibawah ini :

- I. Nama : **KAMIL RASYID, ST**
Nip : 19810511 200902 1 001
Jabatan : Sekretaris Camat
Alamat : Magani

Bertindak atas nama Camat Nuha untuk melakukan evaluasi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : **LINA BATE BANDERA, S.M**
Nip : 19780903 201101 2 008
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Alamat : Sorowako

Bertindak sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Kecamatan Nuha untuk dilakukan evaluasi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sesuai dengan hasil Desk Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan IV serta mencermati format pengendalian dan evaluasi RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 Triwulan IV, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

| No. | Uraian | Jumlah | Realisasi | Presentase |
|-----|--------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1. | Anggaran | Rp. 3.619.752.756 | Rp. 3.349.765.552 | 99,99 % |
| 2. | Program | 1 | 1 | |
| 3. | Kegiatan | 6 | 6 | |
| 4. | Sub Kegiatan | 18 | 18 | |

Secara rinci catatan permasalahan dan rekomendasi tindak lanjut menjadi lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

PIHAK KEDUA

LINA BATE BANDERA, S.M
Nip. 19780903 201101 2 008

PIHAK PERTAMA

KAMIL RASYID, ST
Nip. 19810511 200902 1 001

Mengetahui,
Camat Nuha

ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom
Nip. 198102042009021001

Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV dan Penyusunan LAKIP
2025,Tanggal 07 Januari 2026 di Aula Kantor Camat Nuha







PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN NUHA

Jl. Diponegoro No. 02 Telp/Fax (0475) 321 258 Sorowako 92984

NOTULA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DAN ANGGARAN TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025 KECAMATAN NUHA

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Januari 2025

Waktu : Pukul 09.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Kecamatan Nuha

Agenda Rapat : Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Triwulan IV

Pimpinan Rapat : Camat Nuha

Notulis : HASNIAR,S.Sos

A. DAFTAR HADIR

(Terlampir)

Peserta rapat terdiri dari:

- Camat Nuha
- Sekretaris Kecamatan Nuha
- Para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian
- Pelaksana terkait

B. URAIAN JALANNYA RAPAT

1. Pembukaan

Rapat dibuka oleh Camat Nuha pada pukul 09.41 WITA. Dalam sambutannya, Camat Nuha menyampaikan bahwa rapat monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan untuk menilai capaian kinerja dan realisasi anggaran Triwulan IV serta sebagai bahan evaluasi akhir tahun.

2. Pemaparan Capaian Kinerja dan Anggaran

Sekretaris Kecamatan menyampaikan gambaran umum realisasi kinerja dan anggaran Triwulan IV, dengan poin-poin sebagai berikut:

- Sebagian besar program dan kegiatan Kecamatan Nuha telah mencapai target kinerja 100%;
- Realisasi anggaran menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, dengan tetap mempertahankan capaian output;

- Terdapat beberapa sub kegiatan dengan efisiensi anggaran cukup tinggi tanpa mempengaruhi capaian kinerja.
3. **Pembahasan Permasalahan dan Kendala**
- Dalam sesi diskusi, beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain:
- Masih perlunya peningkatan ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan;
 - Kebutuhan penguatan dokumentasi pendukung kegiatan sebagai bukti kinerja;
 - Perlunya evaluasi internal secara berkala pada masing-masing seksi.
4. **TanggapandanArahanPimpinan**
- Camat Nuha menekankan pentingnya:
- Menjadikan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya;
 - Meningkatkan koordinasi antar seksi dan sub bagian;
 - Menyusun laporan kinerja dan keuangan secara lebih tertib, lengkap, dan akuntabel.

C. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

1. Seluruh seksi dan sub bagian diminta untuk menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja dan anggaran Triwulan IV.
2. Setiap kegiatan wajib dilengkapi dengan dokumentasi pendukung yang memadai (daftar hadir, notula, laporan kegiatan).
3. Evaluasi mandiri kinerja dan anggaran akan dilaksanakan secara rutin pada setiap triwulan berikutnya.
4. Hasil rapat ini menjadi bahan penyusunan laporan kinerja akhir tahun Kecamatan Nuha.

D. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Camat Nuha pada pukul 15.00 WITA. Diharapkan seluruh hasil keputusan rapat dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Kecamatan Nuha.

Pimpinan Rapat

Camat Nuha
Keppegawaian



ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom, M.Si
NIP.19810204 200902 1 001

Nuha, 07 Januari 2026

Notulis

Kasubag Perencanaan dan

HASNIAR, S.Sos

NIP.19830305 200604 2 020